

## ABSTRAK

Pelaksanaan Pemilu 2024 diperkirakan akan memakan anggaran lebih besar mencapai angka Rp. 86 Triliun. Terdapat wacana penundaan pemilu tahun 2024, dampak dari adanya wacana tersebut menimbulkan persepsi dikalangan para elit politik. Tujuan penelitian ini menganalisis persepsi elit partai politik Lampung terhadap wacana penundaan pemilu tahun 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden Republik Indonesia menjadi tiga periode. Penelitian ini menggunakan teori persepsi dan elit politik. Metode penelitian menggunakan deskriptif dengan pendekatan analisis wacana kritis. Informan meliputi para pengurus-pengurus inti (PKB, GOLKAR, PAN) yang secara struktural kepengurusannya berada di level Provinsi Lampung. Hasil penelitian menjelaskan bahwa PAN, PKB, dan GOLKAR menyatakan penolakan terhadap penundaan pemilu dan mengembalikannya pada mekanisme putusan konstitusi dan perundangan serta kebijakan partai secara kelembagaan yang dalam hal ini menjadi hak prerogatif pengurus pusat. Dua dari tiga partai politik tersebut berpendapat bahwa aspek biaya penyelenggaraan pemilu di Indonesia memang terbilang fantastis, sehingga perlu adanya evaluasi-evaluasi pada aspek efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan. Sedangkan satu lainnya, berpendapat bahwa, meskipun biaya pemilu terbilang fantastis tetapi ini merupakan hal biasa dalam Negara demokrasi. Dalam persoalan biaya politik yang besar dikeluarkan oleh calon, ketiga partai berpendapat bahwa biaya yang besar tersebut sangat berpotensi untuk melakukan praktik korupsi dalam ranah pengembalian modal kampanye dan memperkaya diri. ketiga partai juga menyatakan bahwa dari aspek demokrasi dalam konteks penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi persoalan krusial, dan apabila pemilu mengalami penundaan tentu tidak seseusi dengan prinsip demokrasi dan suatu bentuk kegagalan.

**Kata Kunci: Persepsi Politik; Elit Politik; Penundaan Pemilu 2024**

## ABSTRACT

The implementation of the 2024 election is expected to require a larger budget reaching Rp. 86 Trillion. There is a discourse on postponing the 2024 elections, the impact of this discourse has created perceptions among the political elite. The purpose of this study is to analyze the perceptions of the Lampung political party elite on the discourse on postponing the 2024 elections and extending the term of office of the President of the Republic of Indonesia to three terms. This study uses the theory of perception and political elites. The research method uses descriptive with a critical discourse analysis approach. Informants included core administrators (PKB, GOLKAR, PAN) whose management structure is at the Lampung Province level. The results of the study explained that PAN, PKB, and GOLKAR expressed their rejection of postponing elections and returning them to the constitutional decision mechanism and legislation as well as institutional party policies which in this case became the prerogative of the central board. Two of the three political parties are of the opinion that the cost aspect of holding elections in Indonesia is indeed fantastic, so there is a need for evaluations on the efficiency and effectiveness aspects of the implementation. Meanwhile, another argues that, even though the election costs are fantastic, this is a common thing in democratic countries. In terms of the large political costs incurred by candidates, the three parties are of the opinion that these large costs have the potential to carry out corrupt practices in the realm of returning campaign capital and enriching themselves. the three parties also stated that from a democratic

aspect in the context of postponing elections and extending the term of office of the president it is a crucial issue, and if elections are postponed it is certainly not in accordance with democratic principles and a form of failure.

Keywords: Political Perceptions; Political Elite; Postponement of the 2024 Election